RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2025 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2026 Nomor 395);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA Tahun 2027, PPAS Tahun 2027 serta Rancangan RAPBD Kabupaten Bengkalis.

(2) Tujuan Penetapan RKPD Tahun 2027 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten yang selaras dengan perencanaan Provinsi Riau dan Nasional.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2027 meliputi:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait lainnya.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja menggunakan pendekatan yang partisipatif, terukur, dan berbasis kinerja. Fokus utama pada tahun 2027 diarahkan pada percepatan pencapaian target indikator kinerja daerah, penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan merupakan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan analisis terhadap isu strategis yang berkembang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja sangat bergantung pada sinergi dan komitmen bersama antara seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

Bathin Solapan, 3 Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

Sevnur, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720511 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN …… 1
1.1. Latar Belakang …… 1
1.2. Dasar Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan ……... 6
1.4. Sistematika Penulisan ……... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 …… 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah …….. 11
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan ……. 12
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan ……. 15
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan ……. 16
2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan …….. 16
2.1.5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target, Capaian Program Renstra Perangkat Daerah .. 17
2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, Dan Melebihi Target Kinerja ……. 18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …….. 38
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD ……..…….. 63
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….. 84

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……** 85
3.1. Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional …….. 85
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ……. 87
3.3. Program dan Kegiatan …….. 90

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……** 105

BAB V **PENUTUP ……..** 125
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan TW I Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (T-C.29) ……..	20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (Tabel T-C.30) ……	38
Tabel 2.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ……	40
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten BengkalisTahun 2021-2025 ……..	40
Tabel 2.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025 ……	41
Tabel 2.6	Matriks Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dan Dampaknya Terhadap Visi-Misi, Program Nasional, Dan SDGs ……..	45
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2027 (T-C.31) ….	64
Tabel 2.8	Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Berdasarkan Skala Prioritas (T-C.32) ……...	84
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 …….	90
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 …….	90
Tabel 3.3	Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027 …….	90
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (T-C.33) ……..	93
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027 …….	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Daerah …….	2
Gambar I.2.	Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD …….	3
Gambar II.1.	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkalis 2021-2025……..	40
Gambar IV.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan ….	105

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

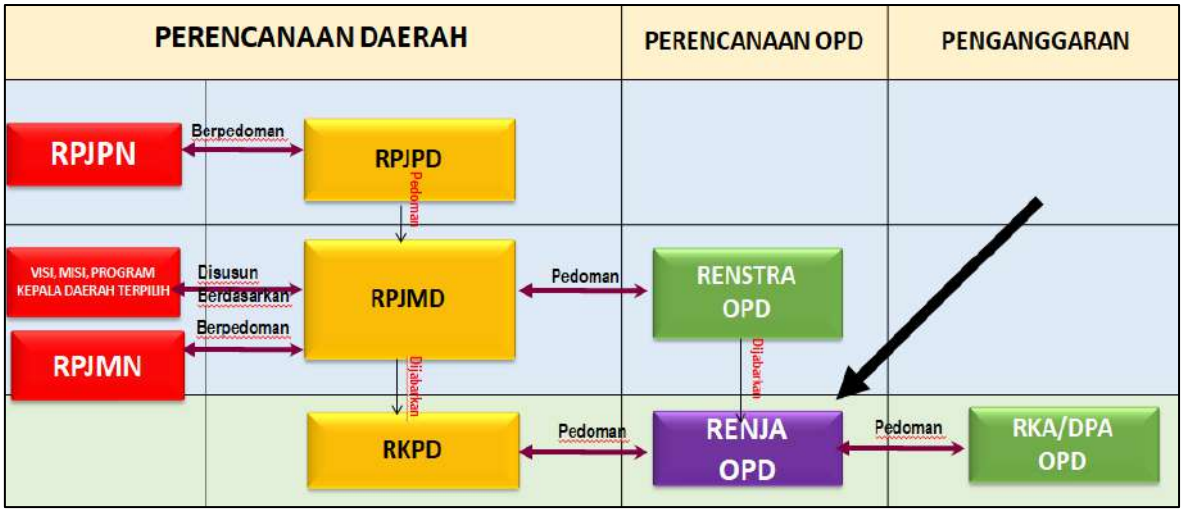
Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efektif dan efisien yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART: *Specific* (spesifik) - *Measurable* (terukur) - *Achievable* (dapat dicapai) - *Relevant* (relevan) - *Time-bound* (terbatas waktu), terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan-pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan-disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis dan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelangaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja adalah hubungan hierarki logis dan penurunan (*cascading*) kinerja di mana visi-misi makro daerah diturunkan menjadi strategi instansi, kemudian dieksekusi melalui aksi nyata tahunan. Ketiga

dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Secara mendasar, ketiganya bergerak dari ranah makro-strategis menuju mikro-operasional.



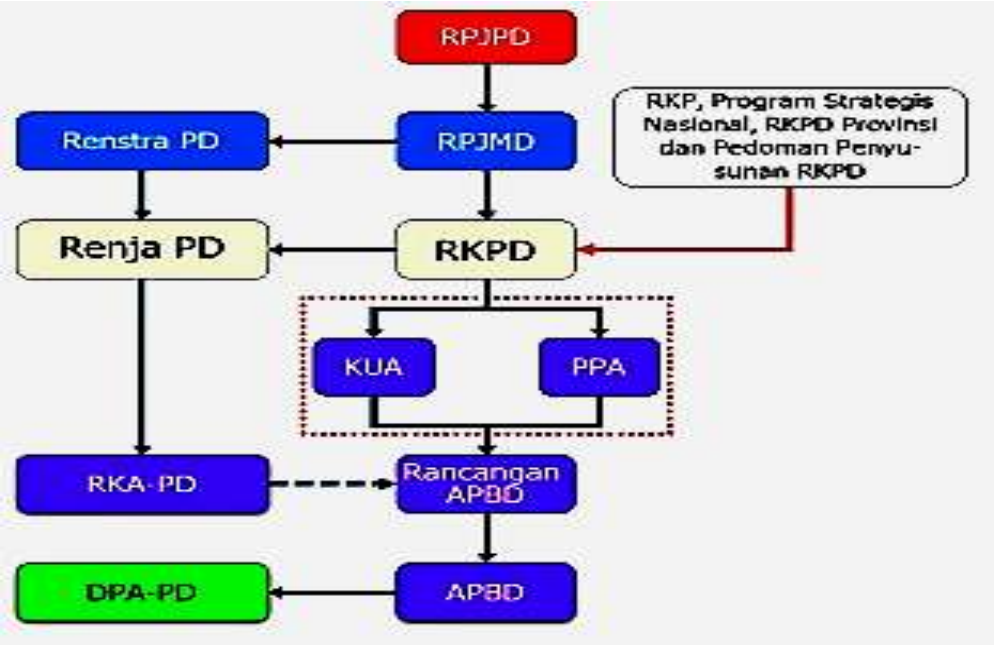
Gambar I.1. Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Daerah
Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No.86 Tahun 2017

Keterkaitan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja mutlak diperlukan untuk:

1. Menjamin konsistensi anggaran, dokumen Rencana Kerja menjadi basis penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan alur yang runtut, setiap rupiah yang dibelanjakan daerah dipastikan berkontribusi langsung pada pencapaian visi kepala daerah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Akuntabilitas kinerja, melalui rantai hasil (*results chain*), kegagalan target tahunan di Rencana Kerja akan otomatis memengaruhi capaian target jangka menengah di Renstra, dan berisiko menggagalkan target makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Sinkronisasi antar-sektor, menghindari tumpang tindih program antar-dinas karena semua pergerakan bermuara pada satu komando strategis yang sama di tingkat daerah.

Sedangkan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), hingga penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

adalah hubungan hierarkis dan fungsional yang memastikan keselarasan program pembangunan dari pusat hingga daerah.



Gambar I.2. Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD
Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No.86 Tahun 2017

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dan merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 serta hasil evaluasi kinerja tahun 2025 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dan *Buttom Up Planning*.

Sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Bengkalis saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan prioritas. Pertama, tingginya angka pengangguran, khususnya pada kelompok usia produktif dan lulusan baru yang menjadi indikator bahwa penyerapan tenaga kerja di pasar kerja lokal belum optimal. Kedua, minimnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ketiga, rendahnya kesempatan kerja di sektor formal dan informal menyebabkan terbatasnya pilihan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di beberapa wilayah belum berjalan harmonis. Hal ini ditandai dengan masih adanya potensi konflik ketenagakerjaan

yang dapat mengganggu iklim investasi dan produktivitas kerja. Selain itu, pemberdayaan dan pembangunan kawasan transmigrasi juga belum optimal, sehingga peran kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, fasilitasi hubungan industrial yang harmonis, serta mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi. Upaya ini akan dilaksanakan melalui program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, pembinaan hubungan industrial, dan pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, aspirasi masyarakat, serta pagu indikatif yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan kinerja dan tematik, dokumen ini diharapkan menjadi acuan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2027, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 merujuk dan berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor

5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 43);

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027 adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sampai akhir tahun anggaran 2027 serta agar dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai berdasarkan target-target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2027.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027 antara lain:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis di tahun 2027;

b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2027 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya Bagian Ketujuh tentang Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah, yakni:

COVER	Judul Cover: "RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2027 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PERBUP PENETAPAN	Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027
DAFTAR ISI	Sesuai dengan isi Renja Perangkat Daerah
DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel
DAFTAR GAMBAR Jika dalam Ranwal Renja menyajikan Gambar	Judul Gambar dan Halaman Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
1.2.	Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
1.3.	Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.4.	Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	2.1.1.	Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
		2.1.2.	Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
		2.1.3.	Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
		2.1.4.	Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
		2.1.5	Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
		2.1.6.	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan Tabel T-C.29
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayananan Perangat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK menggunakan Tabel T-C.30	

2.3.	Isu-isu Penting Penyelanggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dareah	Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistainable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4.	Review Terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja berdasarkan analisis kebutuhan pagu terkini dengan proyeksi pagu program pada penggalan tahun 2027 pada pagu program RPJMD Tahun 2025-2029 dan proyeksi pagu program, kegiatan, sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk rumusan program sebagai akibat adanya kebijakan nasional yang bersifat penting dan mendesak yang harus disusun pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 (kegiatan yang berhubungan dengan DAK). Menggunakan Tabel T-C.31
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Konsultasi Publik atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Mengggunakan Tabel T-C.32

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah

3.3.	Program dan Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraiaian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan Tabel T-C.33

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Rumusan Peta Resiko Renja 2027
5. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tangan tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN

Hasil Pemetaan Nomenklatur Program dan Nomenklatur Kegiatan Tahun 2027 pada Renstra Perangkat Daerah terhadap Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

==========

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan periode transisi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ke Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Mempertimbangkan masa transisi tersebut maka rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis masih merunut pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang memiliki tujuan strategis “Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah” dan sasaran strategis “Menurunnya Pengangguran Terbuka” dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, dan program yang secara tidak langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan program-program teknis urusan ketenagakerjaan dan ketransrmigrasian antara lain Program Perencanaan Tenaga, Program Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sedangkan program yang tidak langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bengkalis adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2025 terdapat 7 program, 17 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, sedangkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 berubah menjadi 7 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa indikator kinerja hasil/keluaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Beberapa program yang belum tercapai target kinerjanya pada tahun 2025, antara lain:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif, terpadu, dan sistematis mengenai ketenagakerjaan. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi instrumen kendali dalam mengelola sumber daya manusia agar tetap relevan dengan visi dan misi organisasi/instansi.

Program Perencanaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025 merupakan program yang mengakomodir Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan 2 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan target kinerja program sebesar 92%. Dari 2 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, hanya 1 sub kegiatan yang terlaksana yakni Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan indikator kinerja “jumlah sumber daya manusia perusahaan yang mampu menyusun rencana tenaga kerja mikro” dan target

kinerja sebanyak 10 orang. Sehingga dari 92% target program yang direncanakan hanya dapat terealisasi sebesar 50% sehingga capaiannya hanya sebesar 46%. Kondisi ini karena mempertimbangkan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis lebih memprioritaskan kegiatan yang memiliki manfaat secara langsung untuk masyarakat yang dalam konteks pelaksanaan program Perencanaan Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia dari pelaku usaha baik berskala besar maupun kecil.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki sasaran program meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator sasaran program persentase tenaga kerja yang ditingkatkan daya saing dan produktivitasnya, didukung oleh 3 kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dan Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil. Target kinerja program sebesar 30% dapat direalisasikan sebesar 62,50% atau capaian programnya setara dengan 18,75%. Hal ini disebabkan oleh Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang memiliki target jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N sebanyak 64 orang hanya terealisasi sebanyak 48 orang. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang memiliki target jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas sebanyak 2 perusahaan juga tidak dapat direalisasikan atau capaian sub kegiatannya 0% sebagai akibat dari adanya efisiensi anggaran.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan program yang mengakomodir kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) bagi para calon tenaga kerja dan *job fair* atau bursa kerja. Target capaian program sebesar 87% dapat direalisasikan sebesar 72,73% atau capaian programnya setara dengan 63,27%. Tercatat 909 orang mendaftarkan diri dalam proses pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) dari 2000 orang yang ditargetkan dalam Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

karenanya capaian kinerja program belum dapat tercapai secara optimal. Terdapat catatan dalam pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) dimana jadwal pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan telaah lebih mendalam menyesuaikan jadwal penerimaan calon pencari kerja pada setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabuapaten Bengkalis sehingga penerimaan calon pencari kerja pada kegiatan bursa kerja (*job fair*) lebih tepat sasaran dan dapat menyerap lebih banyak lowongan pekerjaan yang ada.

4. Program Hubungan Industrial

Sepanjang tahun 2025, perkara dapat dicegah sebanyak 30 perkara dari 20 kasus yang ditargetkan, dan dari target 25 perkara yang dapat diselesaikan telah direalisasikan sebanyak 23 perkara. Program Hubungan Industrial didukung oleh 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Dari 97% target kinerja Program Hubungan Industrial dapat direalisasikan sebesar 87,23% atau capaian programnya sebesar 84,61%. Penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan transformasi ekosistem ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan produktivitas nasional. Sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan itu mulai dari kurangnya komunikasi efektif di tingkat perusahaan, keterbatasan jumlah mediator, hingga belum optimalnya peran lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan implementasi perjanjian kerja sama. Hubungan industrial yang transformatif lahir dari komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. keberhasilan hubungan industrial tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam menerapkan praktik terbaik. Kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja adalah fondasi penting untuk menciptakan ekosistem kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan.

Selain kegiatan penyelesaian kasus hubungan industrial, program Hubungan Industrial juga mengakomodir pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa dukungan dana untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi non Aparatur Sipil Negara sebanyak 34.000 orang selama 12 bulan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis dan telah direalisasikan

sebanyak 31.449 orang. Tidak tercapainya target penerima manfaat JKK-JKM karena Nomor Induk Kependudukan peserta tidak valid, peserta telah meniggal dunia, peserta telah berusia diatas 65 tahun, peserta sudah bekerja di perusahaan, peserta terdaftar sebagai pekerja mandiri, peserta melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat dan terdafatar secara mandiri.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Diantara program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi meskipun kegiatan telah 100% dilaksanakan namun hasil yang diharapkan yakni keluarnya legalitas status lahan yang ditempati oleh masyarakat transmigrasi belum dapat direalisasikan dikarenakan kendala proses administrasi. Telah dilakukan verifikasi ulang terkait peta Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IPL) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, dari hasil verifikasi ulang tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Sebagaimana tercantum didalam Notula Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi bahwa perlu dilakukan sinkronisasi dan validasi data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi, terhadap kegiatan sertipikasi tanah transmigrasi agar dapat terlebih dahulu dilaksanakan pemasangan tanda batas yang disepakati oleh sempadan batas tanah. Atas kendala yang dihadapi tersebut maka tahun 2026 akan diusulkan pembaharuan data Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IPL) secara lebih terperinci ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmimgrasi Provinsi Riau. Dari target program sebesar 100% yang direncankan, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian program sebesar 100%.

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Memperhatikan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Cingam maupun Desa Makeruh telah dilakukan pelatihan-pelatihan pengolahan hasil laut

secara sederhana bagi masyarakat transmigrasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Namun dengan kondisi ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang kurang memungkinkan, pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran. Ke depan perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut terkait jenis pelatihan dan tindak lanjut hasil pelatihan yang diterima oleh warga transmigrasi sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Dari target program sebesar 100% yang direncankan, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian program sebesar 100%.

Pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melalui Bidang Transmigrasi juga mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan berdasarkan surat dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 650/PRC.01.01/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 Hal Penyampaian Satker Penerima Anggaran Tugas Pembantuan TA 2025 Dan Permintaan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) TA 2025 sebesar Rp. 1.149.688.000,- yang dialokasikan bagi pembangunan toilet sekolah dan sarana air bersih sebanyak 5 unit. Dari total anggaran yang diberikan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.140.564.906,- atau serapannya setara dengan 99,21% dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 100%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Diantara program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinjera hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor ini salah satunya disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan pengambilan kebijakan skala prioritas bagi kegiatan-kegiatan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Proses pencapaian target kinerja tidak terlepas dari adanya faktor penghambat maupun pendorong yang sangat berpengaruh terhadap hasil capaian kinerja. Beberapa faktor yang menghambat ketercapaian target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini jumlah dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
2. Banyak pelaku usaha atau instansi yang belum memahami pentingnya perencanaan sumber daya manusia sektor ketenagakerjaan secara sistematis;
3. Belum adanya keterbukaan informasi lowongan kerja dari pihak perusahaan yang bergerak di wilayah Kabupaten Bengkalis;
4. Pembatasan belanja untuk kegiatan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 900.1.12/83/BPKAD tertanggal 23 Januari 2025 hal Tindak Lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

Sedangkan beberapa faktor pendukung ketercapaian target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Tingginya minat dan antusiasme pelaku Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk meningkatkan kompetensi lembaganya;
2. Dukungan kemitraan dengan Unit Pelaksana Teknis dan perusahaan swasta;
3. Inisiatif pekerja melaporkan kasus hubungan industrial yang dialaminya;
4. Perusahaan yang kooperatif pada saat proses mediasi kasus hubungan industrial.

2.1.5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target, Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memiliki keterkaitan linier dan kausalitas yang kuat terhadap pemenuhan target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Dinamika pelaksanaan anggaran, perubahan regulasi, serta perkembangan indikator kinerja hingga tahun berjalan memunculkan beberapa implikasi strategis terhadap target dan capaian program Rencana Strategis (Renstra), antara lain:

1. Optimalisasi capaian target tahunan

   Penetapan target kinerja dalam Rencana Kerja ini disusun dengan memperhitungkan *gap* (kesenjangan) antara realisasi tahun sebelumnya dengan target akhir masa Rencana Strategis. Hal ini berimplikasi pada perlunya melakukan akselerasi pada program-program yang capaiannya masih di bawah

target prospektif, guna menjamin target akumulatif Rencana Strategis dapat terpenuhi tepat waktu;

2. Rasionalisasi target indikator

   Dalam kondisi terjadinya pergeseran kebijakan fiskal daerah atau perubahan asumsi makro, Rencana Kerja ini merespons dengan melakukan rasionalisasi target pada tingkat kegiatan dan sub-kegiatan. Implikasinya, beberapa target capaian program Rencana Strategis disesuaikan secara bertahap agar tetap realistis dan dapat dicapai (*achievable*) dengan alokasi sumber daya yang tersedia;

3. Efisiensi dan pengurangan aktivitas pendukung

   Guna mengantisipasi keterbatasan ruang fiskal, timbul implikasi berupa restrukturisasi belanja. Aktivitas yang bersifat administratif atau penunjang dikendalikan secara ketat, sementara daya dukung anggaran diprioritaskan penuh pada pemenuhan target program pelayanan langsung kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis;

4. Peningkatan mutu akuntabilitas kinerja

   Implikasi terhadap target Rencana Strategis ini menuntut sistem pemantauan dan evaluasi dalam Rencana Kerja berjalan secara lebih ketat dan berkala. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap deviasi atau kendala dalam pencapaian target tahunan dapat dideteksi lebih dini, sehingga tidak mengganggu target makro Perangkat Daerah.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, Dan Melebihi Target Kinerja

Berdasarkan analisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, dan melebihi target kinerja, maka diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran antara lain:

1. Untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target

   a. Penguatan Perencanaan Berbasis Bukti

      Menerapkan *evidence based planning* dengan menggunakan data capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan masyarakat sasaran. Target kinerja ditetapkan dengan prinsip SMART dan realistis sesuai kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan anggaran;

b. Peningkatan Disiplin Anggaran

Menyusun *cash flow* dan rencana penarikan dana yang akurat. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terkait jadwal pencairan agar tidak terjadi keterlambatan yang menghambat pelaksanaan kegiatan;

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menganggarkan kegiatan bimbingan teknis, *coaching clinic*, atau *e-learning* bagi pengelola kegiatan dan PPK terkait penyusunan dokumen, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan;

d. Mitigasi Risiko Eksternal

Mengintegrasikan analisis risiko pada setiap dokumen perencanaan, membangun skema kerjasama lintas OPD/vertikal yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama agar koordinasi lebih formal;

e. Percepatan Proses Pengadaan

Melakukan *early procurement* dan menyusun paket pekerjaan lebih awal.

2. Untuk Mempertahankan Kondisi Terpenuhinya Target

a. Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan monitoring evaluasi triwulan dan review capaian kinerja. Hasil monitoring evaluasi langsung dipakai untuk *course correction* pada triwulan berikutnya, bukan menunggu akhir tahun;

3. Untuk Mengelola Kondisi Melebihi Target

a. Penyesuaian Target Tahun Berikutnya

Menggunakan capaian *over target* sebagai dasar perhitungan kembali target Rencana Kerja tahun berikutnya agar lebih menantang namun tetap realistis;

b. Penguatan Kapasitas Penyerapan Anggaran

Jika *over target* terjadi karena tambahan anggaran, maka perlu penguatan perencanaan penyerapan anggaran di APBD Perubahan agar tambahan anggaran dapat dimanfaatkan optimal tanpa SilPA tinggi.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan TW I Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
(T-C.29)

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah (%)	500%	200%	100%	86,34%	86,34%	100%	387%	77,43%
2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (%)	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	5	3	3	100%	2	10	83,33%
2.07.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	8	4	4	100%	0	12	60,00%
2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan (%)	500%	200%	100%	59,09%	59.09%	100%	400%	80,00%
2.07.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	405	107	66	39	59,09%	66	239	59,01%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun (%)	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%
2.07.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10	3	2	2	100%	0	5	50,00%
2.07.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	500%	200%	100%	0%	0%	100%	300%	60,00%
2.07.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	62	0	0	0	0%	0	0	0,00%
2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500%	200%	100%	95,29%	95,29%	100%	400%	80,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
2.07.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
2.07.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
2.07.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
2.07.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2900	735	600	335	55,83%	600	1670	57,59%
2.07.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	2	1	1	100%	0	3	60,00%
2.07.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	500	200%	100%	50%	50%	100%	400%	0,80%
2.07.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16	70	10	35	100%	0	105	656,25%
2.07.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	180	5	14	0	0%	4	9	5,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan (%)	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%
2.07.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	812	12	12	100%	250	1074	1790,00%
2.07.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
2.07.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
2.07.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500%	200%	100%	100%	100%	100%	397%	79,40%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	73	27	14	14	100%	14	55	75,34%
2.07.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	50	10	10	100%	41	101	101,00%
2.07.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	30	12	6	6	100%	6	24	80,00%
2.07.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	20	6	3	3	100%	1	10	50,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	500%	73%	92%	50,00%	46,00%	100%	190%	38,03%
2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (%)	500%	72,50%	35%	50,00%	46,00%	100%	190%	38,03%
2.07.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5	1	1	0	0%	1	2	40,00%
2.07.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro (Orang)	100	10	10	10	100%	0	20	20,00%
2.07.03 -	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih (%)	500%	111%	30%	62,50%	18,75%	100%	311%	62,10%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya (%)	500%	133%	100%	58,33%	58,33%	100%	332%	66,47%
2.07.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N (Orang)	500	133	64	48	75%	118	299	59,80%
2.07.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N (Lembaga)	25	9	2	5	100%	1	15	60,00%
2.07.03.2.01.0003	Sub Kegaiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	45	0	0	0	0%	4	4	8,89%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina (%)	500%	210%	100%	100%	100%	100%	410%	82,00%
2.07.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	50	22	2	11	550%	6	39	78,00%
2.07.03.2.03	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Terdaftar (%)	500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
2.07.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	25	0	0	0	0%	0	0	0,00%
2.07.03.2.04	Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya (%)	500%	100%	20%	0%	0%	0%	100%	20,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	25	4	2	0	0%	0	4	16,00%
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	438%	200%	87%	72,73%	63,27%	87%	387%	88,36%
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (%)	500%	158%	100%	72,73%	72,73%	100%	358%	71,60%
2.07.04.2.03.0002.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	11500	3399	2000	909	45%	2000	6308	54,85%
2.07.04.2.03.0003.	Sub Kegiatan Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja (Orang)	850	150	50	50	100%	50	250	29,41%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan (%)	440%	178%	97,00%	87,23%	84,61%	85,00%	362%	82,33%
2.07.05.2.01.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	113%	187%	100%	78,33%	78,33%	20,00%	307%	271,38%
2.07.05.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	113	31	20	19	95%	20	70	61,95%
2.07.05.2.01.0002.	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	65	8	5	2	40%	10	20	30,77%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.05.2.01.0003.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
2.07.05.2.02.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota (%)	500%	169%	100%	96,12%	96,12%	100%	368%	73,56%
2.07.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	140	42	20	30	150%	25	97	69,29%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.05.2.02.0002.	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	140	35	25	23	92%	26	84	60,00%
2.07.05.2.02.0003.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi & Serikat Pekerja)	126	1	0	0	0%	0	1	0,79%
2.07.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.07.05.2.02.0005.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ***Program Unggulan*	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	170000	65449	34000	31449	92%	34000	130898	77,00%
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	500%	200%	100%	100,00%	100%	100%	400%	79,94%
3.32.02.2.01.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (%)	500%	200%	100%	100,00%	100%	100%	400%	79,94%
3.32.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan - Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (th 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2: 2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1: 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
3.32.03 -	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%)	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.32.03.2.01.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota (%)	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.32.03.2.01.0006.	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	100	16	16	16	100%	16	48	48,00%

Sumber: Monev Disnakertrans Kabupaten Bengkalis Triwulan IV (data diolah)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 maka Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang merujuk ke dokumen Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, adalah:

1. Tingkat kesempatan kerja
2. Tingkat produktivitas tenaga kerja
3. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan
4. Tingkat kesempatan kerja di wilayah transmigrasi

Terdapat ketidaksesuaian Indikator Sasaran Strategis yang tercantum didalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 dengan yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh proses penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 dilakukan setelah Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditetapkan. Karenanya analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tetap menggunakan indikator kinerja yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 94,68% dari sebelumnya 94,12% pada Tahun 2024. Peningkatan sebesar 0,56 poin ini menunjukkan membaiknya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis. Jumlah penduduk bekerja juga meningkat dari 264.884 orang pada 2024 menjadi 280.345 orang pada 2025, atau bertambah sebanyak 15.461 orang. Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja ini didorong oleh membaiknya kegiatan ekonomi di sektor perkebunan, perdagangan, dan jasa. Meskipun Tingkat Kesempatan Kerja masih diatas 90%, jumlah penganggur sebanyak 15.762 orang pada 2025 menjadi tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk memperluas akses pelatihan dan penempatan kerja. Pada tahun 2027 rencana strategi yang akan dilaksanakan antara lain meningkatkan program padat karya, pelatihan vokasi, *job fair*, dan

sinergi dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Bengkalis untuk menurunkan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan olahan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, produktivitas tenaga kerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 288.965.381,94 per pekerja. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,74% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 297.111.188,29 per pekerja. Penurunan produktivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan pertumbuhan sektor-sektor utama penyerap tenaga kerja, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta adanya penambahan jumlah tenaga kerja baru yang belum sepenuhnya terserap pada sektor produktif. Sebagai upaya peningkatan produktivitas di tahun 2027, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pada penguatan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi, peningkatan *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri, serta mendorong kewirausahaan dan padat karya produktif.

Indikator Kinerja Kunci proporsi penciptaan lapangan kerja formal tahun 2025 dari target sebesar 47,96% yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sebesar 46,35% dengan capaian kinerja sebesar 96,64%. Belum tercapainya target secara optimal disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja lebih banyak di sektor informal. Struktur perekonomian daerah yang masih didominasi UMKM, pertanian, dan perdagangan skala kecil menyebabkan penciptaan kerja formal belum optimal. Beberapa perusahaan baru yang telah menyerap tenaga kerja masih dalam proses pengurusan legalitas NIB dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga belum tercatat sebagai loker formal pada tahun berjalan. Selain itu juga terdapat jeda waktu antara penyerapan tenaga kerja di perusahaan dengan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan/WLKP ke Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi Kabupaten Bengkalis.

Realisasi indikator Tingkat Kesempatan Kerja di Wilayah Transmigrasi tahun 2025 sebesar 65% dari target 94,5%. Capaian di bawah target menunjukkan masih terdapat transmigran yang belum terserap penuh dalam kegiatan ekonomi produktif di Wilayah Penempatan. Belum tercapainya target tingkat kesempatan kerja di wilayah transmigrasi disebabkan keterbatasan akses pasar dan permodalan. Transmigran belum optimal menjual hasil produksi karena

akses jalan produksi dan lembaga pemasaran belum terbangun sepenuhnya, selain itu juga adanya penambahan angkatan kerja baru yang disebabkan oleh penambahan anggota keluarga transmigran usia kerja yang belum terserap, sehingga meningkatkan denominator angkatan kerja.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (Tabel T-C.30)

No.	Indikator Sasaran Strategis	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025 (n-2)	Tahun 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	Tahun 2025 (n-2)	Tahun 2026 (n-1)	Tahun 2027 (n)	Tahun 2028 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat kesempatan kerja	%	94,50	94,65	94,70	94,77	94,68	-	94,70	94,77	
			Tingkat produktvitas tenaga kerja	%	67,00	68,00	69,00	70,00	-2,74	-	69,00	70,00	
			Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	47,96	47,97	47,98	47,99	46,35	-	47,98	47,99	
			Tingkat kesempatan kerja di wilayah transmigrasi	%	94,5	94,65	94,70	94,77	65,00	-	94,70	94,77	

Sumber: BPS & Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, 2025 (data diolah)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Faktor-faktor penyebab adanya pengangguran terbuka antara lain adalah jumlah penduduk yang tinggi dan peningkatan jumlah angkatan kerja, perubahan struktur ekonomi yang mengikuti perkembangan jaman dengan lebih mengandalkan peralatan canggih sehingga kebutuhan sumber daya manusia sebagai pekerja menurun, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang menjadikan calon pekerja sulit memperoleh pekerjaan serta penurunan tingkat perekonomian yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat atas sebuah produk sehingga mengurangi jumlah produksi.

Faktor kemalasan dan takut mengambil resiko dalam sebuah jenis pekerjaan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisa tingkat pengangguran terbuka yang ada pada sebuah daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan

kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran strategis "Menurunnya Pengangguran Terbuka" dengan indikator kinerja "Tingkat Pengangguran Terbuka" sebagai Indikator Kinerja Utama.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sebanyak 436.905 orang yang terbagi menjadi 223.195 orang laki-laki dan 213.710 orang perempuan, naik 1,34% poin dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 431.131 orang yang terbagi menjadi 220.416 orang laki-laki dan 210.715 orang perempuan. Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 14.662 orang atau setara dengan 5,21% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 281.445 orang dengan kategori 187.559 orang laki-laki dan 93.886 orang perempuan, sehingga pada tahun 2025 jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bengkalis menjadi 296.107 orang dengan kategori 189.005 orang laki-laki dan 107.102 orang perempuan

Masyarakat yang menganggur di Kabupaten Bengkalis tahun 2025 berjumlah 15.762 orang menurun 4,82% poin dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 16.561 orang, dengan uraian 9.143 orang laki-laki turun13,42% dibandingkan tahun tahun 2024 sebanyak 10.560 dan 6.619 orang perempuan naik 10,30% dibandingkan tahun 2024 sebanyak 6.001 orang. Perbandingan jumlah masyarakat yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 tersebut menghasilkan besaran Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,32% turun sebesar 0,56% poin dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,88%. Penurunan tingkat pengangguran tahunan 2025 ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi serta meningkatnya kegiatan sektor industri, perdagangan dan jasa. Sektor informal juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja baru di tengah ketidakpastian pasar kerja formal.

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri khususnya minyak bumi dan gas dengan direvitalisasi dan dioperasikannya sumur-sumur minyak yang sudah lama tidak beroperasi, sektor perkebunan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, konstruksi dan administrasi pemerintah sebagai hasil proses pengangkatan tenaga non Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), implementasi program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah

Putih diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas.

Tabel 2.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

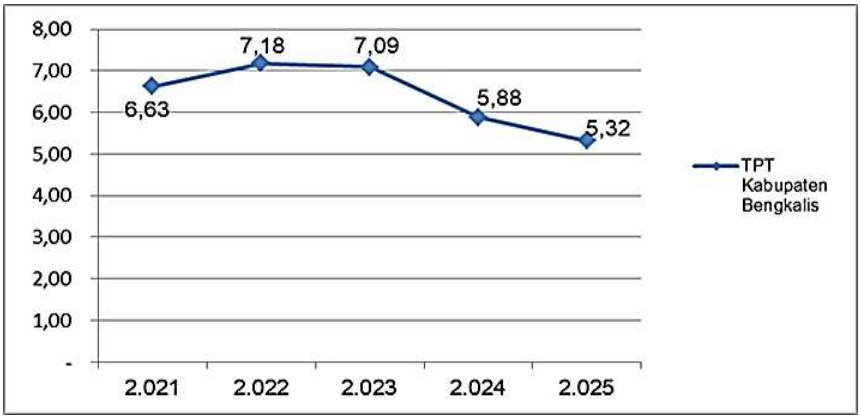
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,8	5,32

Sumber: Sakernas, 2025

Tabel 2.4. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten BengkalisTahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Angkatan Kerja	Orang	269.957	253.988	262.657	281.445	296.107
Bekerja	Orang	252.047	235.761	244.037	264.884	280.345
Menganggur	Orang	17.910	18.227	18.620	16.561	15.762
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,63	7,18	7,09	5,88	5,32

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis (data diolah)



Gambar II.1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkalis 2021-2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Menurunnya Pengangguran Terbuka” dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi Perjanjian Kinerja tahun 2025 menunjukkan angka dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan akan rendahnya jumlah masyarakat yang mengangggur di Kabupaten Bengkalis dapat diwujudkan meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan isu strategis yang perlu ditangani terkait ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan (*vertical*

mismatch) dan peningkatan ketrampilan-ketrampilan berbasis kompetensi sehingga kebutuhan tenaga kerja pada sektor formal maupun non formal dapat terpenuhi.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi senyatanya saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan visi-misi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025

No.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tingginya angka pengangguran	* Jumlah pengangguran yang meningkat setiap saat berbanding terbalik dengan lowongan pekerjaan yang ada sebagai akibat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia serta tingginya mobilitas pendatang ke Kabupaten Bengkalis	* Berlakunya kebijakan terkait pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal
2.	Minimnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja	* Kompetensi pencari kerja masih rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	* Peningkatan dan revitalisasi sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis Latihan
		* Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan atau kompeten serta siap pakai	* Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
		* UPT LK belum dapat memberikan pelatihan kerja secara optimal kareana keterbatasan sarana dan prasarana	
3.	Rendahnya kesempatan kerja	* Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja	* Adanya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja

No.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*
		* Minimnya akses informasi lapangan kerja bagi masyarakat	* Dengan adanya pasar global dan perdagangan bebas mengakibatkan semakin banyak negara asing mendirikan perusahaan di dalam negeri
		* Minimnya inovasi program perluasan lapangan pekerjaan sektor informal sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal	* Maraknya sistim belanja online meningkatkan kesempatan kerja melalui platform digital
		* Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan formal dan non formal	
4.	Hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang belum harmonis	* Kurangnya pengetahuan pekerja terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	* Adanya Mediator hubungan industrial
		* Lemahnya kedudukan dan pendidikan serta tuntutan ekonomi dari pekerja mengakibatkan pekerja tidak terlindungi	* Melakukan pembinaan terhadap sistem dan kelembagaan hubungan industrial;
		* Sosialisasi kebijakan terkait ketenagakerjaan ke perusahaan dan pekerja yang belum optimal	* Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan
5.	Pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal	* Ketidaksesuain data luasan kawasan yang ada di Pemerintah Pusat (Kementerian Transmigrasi), Pemerintah Provinsi (Disnakertrans Provinsi Riau) dan Pemerintah Kabupaten (Disnakertrans Kabupaten Bengkalis)	* Aktifnya kembali Kementerian Transmigrasi * Pelaksanaan program-program baru dari Kementerian Transmigrasi khususnya Trans Patriot sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan
		* Penyediaan dan pelayanan pertanahan kawasan transmigrasi yang belum optimal	
		* Minimnya sarana dan prasarana pendukung di kawasan transmigrasi bagi para transmigran	
		* Peran Lembaga Ekonomi Desa belum optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat transmigran	

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tersebut maka akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia", khususnya pada misi "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian Yang Berdaya Saing".

Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja menghambat terwujudnya "Perekonomian Yang Berdaya Saing" dan "Maju dan Sejahtera", hal tersebut disebabkan oleh daya beli dan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena keterbatasan pendapatan masyarakat akibat belum atau tidak mendapatkan pekerjaan. Minimnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sendiri menghambat upaya "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Efektif", sehingga sumber daya manusia belum dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Sedangkan permasalahan hubungan industrial yang belum harmonis berpotensi menurunkan iklim investasi yang berpotensi menghambat kemajuan perekonomian daerah. Sementara itu pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal menghambat optimalisasi "Potensi Sumber Daya Alam" di wilayah transmigrasi yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang "Berdaya Saing".

Permasalahan-permasalahan tersebut juga berdampak pada beberapa program prioritas nasional sebagaimana tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Terhambatnya penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dikarenakan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja yang rendah;
2. Kurang optimalnya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disebabkan oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya tigkat kesempatan kerja;
3. Terkendalanya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industrialisasi dan hilirisasi yang disebabkan oleh iklim investasi yang kurang kondusif karena hubungan industrial yang belum harmonis.

Secara makro, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berdampak pada pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan/SDGs, antara lain:

1. SDGs 1: Tanpa Kemiskinan [Target 1.2] → angka pengangguran dan rendahnya pendapatan masyarakat transmigran menghambat target penurunan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis;
2. SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi [Target 8.5] → angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesempatan kerja menghambat terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur [Target 9.2] → hubungan industrial yang belum harmonis menghambat pertumbuhan industri dan daya saing daerah;
4. SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan [Target 10.2] → Pengembangan wilayah transmigrasi pada aspek sosial dan ekonomiyang belum optimal menghambat inklusi ekonomi transmigran.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dan dampak yang diakibatkannya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 memfokuskan pada strategi peningkatan pelatihan vokasi berbasis industri, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penguatan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial serta akselerasi pembinaan dan kemandirian wilayah transmigrasi agar selaras dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6. Matriks Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dan Dampaknya Terhadap Visi-Misi, Program Nasional, Dan SDGs

No.	Visi/Misi/ Tujuan/ Sasaran Kabupaten Bengkalis	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Dampak Terhadap Visi-Misi Pemerintah Daerah	Dampak Terhadap SDG's 30	Indikator Renja Terkait	Target 2027
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Visi: Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia Misi: Mewujudkan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Tujuan: Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan SDA Sasaran: Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh dan Berkeadilan	Tingginya angka pengangguran	Menghambat terwujudnya "Perekonomian Yang Berdaya Saing" dan "Maju dan Sejahtera", hal tersebut disebabkan oleh daya beli dan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena keterbatasan pendapatan masyarakat akibat belum atau tidak mendapatkan pekerjaan	SDGs 8.5: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesempatan kerja menghambat terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%
				SDG's 1.2: Menghambat pengurangan kemiskinan	2. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%
2.		Minimnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja	Menghambat upaya "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Efektif", sehingga sumber daya manusia belum dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah	SDG's 8.6: Meningkatkan NEET karena lulusan tidak terserap SDG's 4.4: Menghambat peningkatan ketrampilan untuk bekerja	Persentase calon tenaga kerja yang terlatih	100%
3.		Rendahnya kesempatan kerja	Menghambat terwujudnya "Perekonomian Yang Berdaya Saing" dan "Maju dan Sejahtera", hal tersebut disebabkan oleh daya beli dan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena keterbatasan pendapatan masyarakat akibat belum atau tidak mendapatkan pekerjaan	SDGs 8.5: Tingkat kesempatan kerja yang rendah adalah belum tercapainya lapangan kerja yang penuh	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	88%
4.		Hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang belum harmonis	Berpotensi menurunkan iklim investasi yang berpotensi menghambat kemajuan perekonomian daerah	SDG's 9.2: Menghambat pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan	Besaran kasus yang diselesaikan	85%
5.		Pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal	Menghambat optimalisasi "Potensi Sumber Daya Alam" di wilayah transmigrasi yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang "Berdaya Saing	SDG's 10.2: menghambat inklusi sosial ekonomi transmigran	1.Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	100%
				SDG's 1.2" menghambat penurunan kemiskinan di wilayah transmigrasi	2. Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi	100%
					3. Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	100%

Tantangan merupakan situasi ancaman yang berasal dari luar organisasi (organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis) yang dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Permasalahan yang menjadi tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing daerah di kancah nasional maupun global, serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan lingkungan kerja, dan adopsi teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah tersebut;
2. Pengelolaan lembaga pelatihan kerja swasta yang belum profesional;
3. Rendahnya penyerapan tenaga kerja, salah satu yang mempengaruhi rendahnya penyerapan tenaga kerja adalah kualitas dan kompetensi pencari kerja. Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja maka dianggap sangat penting dilakukan pelatihan berbasis kompetensi, aplikatif dan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga langsung dapat dipraktekkan pada sektor-sektor pekerjaan yang sesuai;
4. Minimnya akses informasi lapangan kerja bagi masyarakat untuk mempermudah para pencari kerja dalam mencari informasi pasar kerja sesuai dengan kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki;
5. Permasalahan hubungan industrial diantaranya adalah masalah perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, upah, jam kerja serta faktor kepentingan;
6. Kurangnya kesadaran perusahaan atau pekerja akan pentingnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
7. Pelaksanaan program transmigrasi yang belum optimal.

Peluang merupakan situasi atau kondisi yang berasal dari luar organisasi (*eksternal*) yang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang bagi organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di masa depan. Beberapa peluang yang terindikasi dan dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Pemanfaatan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

a. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal merupakan peluang besar bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk bisa lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan menegakkan Peraturan Daerah ini agar perusahaan di Bengkalis memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal selain bisa menjadi dasar untuk insentif atau disinsentif bagi perusahaan;
b. Program dan anggaran Pusat/Provinsi**,** pemerintah pusat dan provinsi sering memiliki program serta alokasi anggaran khusus untuk pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, atau transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat aktif mengajukan proposal dan berkolaborasi untuk menarik dana dan program ini ke Kabupaten Bengkalis.

2. Kolaborasi Dengan Dunia Usaha dan Industri
   a. Membangun forum rutin dengan perusahaan-perusahaan besar di Bengkalis (terutama yang bergerak di sektor migas, perkebunan, atau manufaktur) sehingga dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja mereka sehingga memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merancang program pelatihan yang relevan;
   b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat berperan sebagai fasilitator dalam menggalakkan program magang bersertifikat di perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan pengalaman kerja nyata bagi pencari kerja dan mempermudah transisi dari pelatihan ke dunia kerja;
   c. Bekerjasama dengan industri untuk mendirikan pusat pelatihan atau menyelenggarakan pelatihan yang diajarkan oleh praktisi industri dan memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sangat relevan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal
   a. Memaksimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan ketenagakerjaan maupun pelatihan dengan kurikulum yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan pasar kerja termasuk pengadaan peralatan modern dan instruktur yang berkualitas;

b. Fokus pada program pelatihan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional (misalnya oleh BNSP) seperti yang sudah berjalan dengan pelatihan Keselamatan Kesehatan Kerja, *Welder* maupun *Rigger*;
c. Selain *hard skills*, pembekalan *soft skills* seperti komunikasi, kerja tim, etika kerja, dan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja;
d. Melatih dan mendampingi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk dapat menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan
   a. Mengembangkan *platform* digital yang *user-friendly* untuk lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, informasi pelatihan, dan data pasar kerja yang akan mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah akses bagi masyarakat;
   b. Digitalisasi layanan seperti pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atau pelaporan ketenagakerjaan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi;
   c. Memanfaatkan media sosial dan *platform* digital untuk mensosialisasikan program, informasi lowongan, dan tips mencari kerja kepada *audiens* yang lebih luas, terutama generasi muda.
5. Sinergi dengan Lembaga Pendidikan dan Komunitas
   a. Kerjasama dengan SMK/Perguruan Tinggi, membangun jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja dengan memberikan masukan kurikulum yang relevan, menyelenggarakan kunjungan industri, atau bahkan program kelas industri;
   b. Kolaborasi dengan komunitas, melibatkan komunitas lokal, organisasi pemuda, atau Karang Taruna dalam program-program pelatihan dan sosialisasi informasi ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan jangkauan.

Dengan memaksimalkan peluang-peluang tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Perumusan isu strategis atau isu penting yang termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025-2029 disimpulkan dari potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang dicantumkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029 serta hasil analisis situasi dan kondisi eksisting baik permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu lingkungan dinamis (global, nasional maupun regional) yang relevan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Penyerapan Tenaga Kerja Yang Belum Optimal

Angka pengangguran adalah isu kompleks yang seringkali menjadi cerminan dari berbagai masalah ekonomi, sosial, dan struktural. Menganalisis tingginya angka pengangguran berarti kita perlu melihat lebih dari sekadar jumlah orang yang tidak bekerja, tetapi juga faktor-faktor penyebab yang mendasarinya. Isu pengangguran perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal dikarenakan yang bersangkutan tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar terhadap kerawanan sosial yang dapat menganggu keamanan politik secara keseluruhan.

Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui berbagai jenis pelatihan maupun vokasi yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengendalian penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) dengan mengintegrasikan perspektif *gender* ke dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan.

Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja. Beberapa faktor dasar penyebab tingginya angka pengangguran antara lain:

1. Kurangnya Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

   Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak cukup tinggi, artinya investasi dan ekspansi bisnis berjalan lambat, akibatnya kapasitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru juga terbatas. Dominasi sektor-sektor ekonomi padat modal (misalnya industri berat atau pertambangan dengan otomatisasi tinggi) yang tidak menyerap banyak tenaga kerja dapat berkontribusi pada pengangguran, terutama bagi lulusan baru atau pekerja non-spesialis. Selain itu minimnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri menghambat pembukaan usaha baru dan perluasan usaha yang sudah ada, padahal ini adalah motor utama penciptaan lapangan kerja;

2. Ketidaksesuaian Keterampilan (*Mismatch of Skills)*

   Sistem pendidikan, dari tingkat dasar hingga tinggi, mungkin tidak menghasilkan lulusan dengan keterampilan (baik *hard skills* maupun *soft skills*) yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kurikulum yang ketinggalan zaman atau kurangnya fasilitas praktik menjadi penyebabnya. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menyebabkan beberapa jenis pekerjaan menjadi usang (*job displacement*). Serta minimnya akses ke program pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan (*upskilling*) atau mempelajari keterampilan baru (*reskilling*) bagi angkatan kerja lama atau pencari kerja baru. Jika angkatan kerja tidak dibekali dengan keterampilan baru yang relevan dengan teknologi, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan;

3. Faktor Demografi dan Struktur Penduduk

   Bonus demografi yang tidak termanfaatkan, peningkatan jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi) tanpa diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat memperburuk masalah pengangguran. Arus urbanisasi yang tinggi tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja yang cukup di perkotaan seringkali memicu tingginya pengangguran di perkotaan. Banyaknya

lulusan baru setiap tahun menambah daftar pencari kerja. Ketika ekonomi berkembang, ada kecenderungan pekerja dari sektor informal beralih ke sektor formal. Jika sektor formal tidak mampu menyerap, angka pengangguran bisa meningkat;

4. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Regulasi

   Regulasi yang dianggap terlalu kaku, misalnya dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja atau upah minimum yang tinggi tanpa diimbangi produktivitas, dapat membuat perusahaan enggan merekrut karyawan baru atau lebih memilih otomatisasi. Proses memulai atau mengembangkan bisnis yang rumit dan mahal dapat menghambat pertumbuhan usaha dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Kurangnya *platform* atau sistem yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Pencari kerja mungkin tidak tahu ada pekerjaan yang cocok, atau perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang tepat;

5. Kondisi Ekonomi Global dan Lokal

   Resesi ekonomi di tingkat global dapat mengurangi permintaan ekspor, menekan investasi, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan industri dalam negeri untuk mempekerjakan karyawan. Perlu dipertimbangkan terkait perubahan kebijakan yang tidak terprediksi atau kurang konsisten dapat menciptakan iklim investasi yang tidak menarik, menghambat ekspansi bisnis dan penyerapan tenaga kerja. Jika sektor informal sangat besar dan jumlah pekerja tidak terdata dengan baik, ini bisa menyamarkan angka pengangguran sebenarnya, namun tetap menunjukkan masalah struktural dalam ekonomi.

Analisis mendalam terhadap tingginya angka pengangguran memerlukan data yang komprehensif, mulai dari data demografi, pendidikan, sektor ekonomi dominan, hingga kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan pemahaman yang menyeluruh, strategi penanggulangan yang tepat sasaran dapat dirumuskan.

Indikator penting stabilitas ketenagakerjaan yang secara langsung mempengaruhi jumlah orang yang bekerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator penting dalam analisis pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang

bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 (enam belas) sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar tenaga kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Ketika ekonomi berkembang tingkat partisipasi meningkat karena prospek pekerjaan dan upah meningkat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar keterlibatan suatu masyarakat dalam dunia kerja. Jumlah angkatan kerja akan terus bertambah seiring dengan jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar disebabkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, sedangkan jumlah angkatan kerja yang lebih kecil disebabkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah, sehingga persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi lebih rendah. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih besar, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak *output*. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara lain:

1. Siklus bisnis, misalnya selama resesi, lebih sulit bagi orang untuk menemukan pekerjaan baru. Lebih sedikit kesempatan kerja karena bisnis memangkas *output*. Penawaran tenaga kerja menjadi lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Orang yang lama menganggur mungkin menjadi pesimis dan berhenti mencari pekerjaan;
2. Pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah penduduk memberikan penawaran tenaga kerja yang lebih besar. Pertambahan penduduk tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, imigrasi, dan emigrasi;
3. Pendidikan dan keahlian, individu yang berpendidikan lebih tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada orang dengan pendidikan yang lebih rendah. Mereka lebih fleksibel dalam berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya;
4. Kemajuan teknologi, teknologi seperti otomatisasi mengurangi penyerapan tenaga kerja. Beberapa keterampilan menjadi usang dan tidak relevan dengan

permintaan di pasar tenaga kerja;

5. Tidak aktif secara ekonomi, mereka yang saat ini bekerja berhenti dan tidak lagi aktif mencari pekerjaan karena alasan seperti melanjutkan pendidikan tinggi, mengurus rumah tangga, atau memasuki usia pensiun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi karena sebagian besar penduduknya berada dalam usia produktif. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih relatif rendah dibandingkan laki-laki. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan *gender*, tanggung jawab rumah tangga, dan keterbatasan kesempatan kerja yang sesuai dengan keahlian dan pendidikan. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sangat penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan memahami Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pemerintah dapat mengidentifikasi potensi tenaga kerja yang ada, mengembangkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta merumuskan kebijakan untuk mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi dapat menunjukkan kepercayaan diri terhadap perekonomian dan prospek pekerjaan. Namun, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya minat pencari kerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan permintaan pasar dapat menjadi salah satu masalah struktural yang mengganggu perekonomian Kabupaten Bengkalis ketika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi dan tingkat pengangguran terbuka juga meningkat.

Bagian penting yang menjaga ekonomi lokal tetap bertahan adalah tenaga kerja. Sebaliknya, suatu daerah mungkin merasakan tekanan dari tingkat pengangguran yang tinggi, meskipun tenaga kerja ideal dengan tingkat partisipasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, tetapi Kabupaten ini juga berjuang untuk mengimbangi meningkatnya jumlah orang yang mencari pekerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pada saat ini yaitu lajunya peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Dalam permasalahan peningkatan jumlah angkatan kerja, usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan diimbanginya penyediaan lapangan kerja hal ini bertujuan agar penyerapan

tenaga kerja semakin banyak.

Penyerapan tenaga kerja ialah salah satu aspek pendukung dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan di sektor tenaga kerja tersebut diharapkan dapat meratakan pembangunan ekonomi beserta hasilnya untuk seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pemasukan, mengurangi perbandingan keahlian antar wilayah dan struktur perekonomian yang seimbang (Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta Rajawali Pers: Sukirno, Sadono, 2015). Kondisi penyerapan tenaga kerja selama periode 2021-2024 dapat dibilang stabil karena perlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bengkalis. Namun, pemerintah memiliki tantangan yang besar dalam mengembangkan penciptaan lahan kerja baru agar pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja, hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti mensejahterakan masyarakat, menjadi harapan seluruh orang yang dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2. Minimnya Ketrampilan/Kompetensi Calon/Tenaga Kerja

Sebagai daerah yang memiliki jumlah angkatan kerja yang besar, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja. Namun, masalah tenaga kerja dengan ketrampilan yang kurang memadai dan kurang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) telah menjadi tantangan signifikan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa faktor penyebab minimnya ketrampilan/kompetensi calon/tenaga kerja antara lain:

1. Kualitas Pendidikan yang Belum Merata

   Salah satu akar masalah tenaga kerja berketerampilan rendah adalah kualitas pendidikan yang belum merata, terutama di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai. Kurangnya fasilitas sekolah, minimnya tenaga pengajar berkualitas, dan keterbatasan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja turut berkontribusi pada rendahnya keterampilan tenaga kerja;
2. Ketidaksesuaian Antara Pendidikan dan Kebutuhan Industri

   Ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja menjadi faktor penting lainnya. Banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki

keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan baru (*fresh graduate*), sementara perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka;

3. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

   Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja sering kali terabaikan. Perusahaan Kecil dan Menengah (UKM), yang mendominasi perekonomian, sering kali tidak memiliki sumber daya untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan mereka. Selain itu, program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah terkadang kurang relevan atau tidak menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

4. Perkembangan Teknologi yang Cepat

   Perkembangan teknologi yang cepat telah menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru, seperti penguasaan teknologi digital, *data analytics*, dan pemrograman. Namun, banyak tenaga kerja yang belum siap menghadapi perubahan ini karena kurangnya pelatihan dan pendidikan yang sesuai.

Masalah tenaga kerja dengan ketrampilan yang kurang sesuai membawa dampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk:

1. Produktivitas yang rendah

   Tenaga kerja yang kurang terampil cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada keterampilan khusus;

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi

   Tenaga kerja berketerampilan rendah sering kali menerima upah yang lebih rendah, sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini dapat memicu masalah sosial yang lebih luas, seperti kemiskinan dan kriminalitas;

3. Ketergantungan pada tenaga kerja asing

   Ketidakmampuan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri dapat mendorong perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini dapat mengurangi peluang kerja bagi pekerja lokal dan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat;

4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat daya saing di pasar kerja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis perlu memikirkan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah tenaga kerja berketrampilan kurang memadai dan kurang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan

   Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan langkah pertama yang sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua anak di Kabupaten Bengkalis memiliki akses ke pendidikan dasar yang berkualitas. Investasi dalam pelatihan guru, pembangunan infrastruktur sekolah, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja adalah langkah-langkah yang harus diprioritaskan;
2. Program pelatihan dan pengembangan ketrampilan

   Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program ini harus mencakup pelatihan berbasis teknologi, keterampilan teknis, dan *soft skills* seperti komunikasi dan kepemimpinan. Selain itu, program pelatihan harus dirancang agar dapat diakses oleh tenaga kerja termasuk di daerah terpencil;
3. Revitalisasi pendidikan vokasi

   Pendidikan vokasi perlu mendapat perhatian lebih besar. Sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Kolaborasi antara institusi pendidikan vokasi dan perusahaan juga harus ditingkatkan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
4. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan pelatihan

   Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah ini. *E-learning* dan *platform* pelatihan *online* dapat digunakan untuk memberikan akses kepada tenaga kerja di berbagai lokasi. Pemerintah dan perusahaan

dapat bermitra dengan penyedia teknologi untuk menciptakan *platform* yang ramah pengguna dan terjangkau;

5. Insentif untuk perusahaan yang melatih karyawan

   Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak, kepada perusahaan yang secara aktif melatih dan mengembangkan keterampilan karyawan mereka. Langkah ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja;

6. Penguatan kebijakan ketenagakerjaan

   Kebijakan ketenagakerjaan harus diperkuat dan dipertegas implementasinya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Regulasi yang mendukung perlindungan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, dan pengurangan ketimpangan upah harus diimplementasikan secara efektif;

7. Kampanye kesadaran tentang pentingnya keterampilan

   Kesadaran akan pentingnya keterampilan untuk keberhasilan karier perlu ditanamkan sejak dini. Pemerintah, institusi pendidikan dan media dapat bekerjasama untuk mempromosikan pentingnya pendidikan, pengembangan dan peningkatan keterampilan.

Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, dan memanfaatkan teknologi secara optimal, diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan memanfaatkan potensi tenaga kerja yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di pasar global.

3. Hubungan Industrial Yang Belum Harmonis Antara Pekerja Dengan Pengusaha

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja

(Undang-Undang Ketenagakerjaan). Hubungan industrial merupakan bentuk kerjasama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam kegiatan produksi barang atau jasa yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Secara garis besar, hubungan industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan (Penjelasan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Hubungan industrial yang selalu berubah dan berkembang membuat pengusaha dan pekerja harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Perubahan meliputi adanya cara kerja yang lebih modern, Peraturan Pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang terus diperbarui, dan berkembangnya teknologi. Sehingga, pengusaha dan pekerja harus terbuka dengan hal-hal baru. Hubungan industrial menjamin adanya keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Sehingga, hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja harus seimbang. Pemerintah berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Sehingga, hubungan industrial dapat diwujudkan dengan adil (Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan jaminan kepada para pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diberikan jika terjadi kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja maupun sebaliknya, sementara Jaminan Kematian (JKm) diberikan jika terjadi kematian selama hubungan kerja. Kedua program ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dan ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyatakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan

kerja atau mengalami sakit akibat kerja. Sedangkan Jaminan Kematian (JKm) adalah program perlindungan yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia, namun bukan karena kecelakaan kerja. Tujuan dari Jaminan Kematian (JKm) adalah untuk meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan para Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya (klausul kedua nomor ke dua puluh lima). Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakerjaan Di Kabupaten Bengkalis yang juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten yakni program akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat melalui kegiatan pemberian jaminan kesehatan total 100% (seratus persen) kepada masyarakat yang salah satunya adalah program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan Non Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menginisiasi program untuk melindungi masyarakat rentan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk memastikan para pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak, terutama mengingat risiko yang mereka hadapi. Program ini menyasar para pekerja yang masuk dalam kategori rentan, atau pekerja bukan penerima upah. Kelompok ini termasuk petani, nelayan, pekerja bongkar muat, serta peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan terdaftar dalam program ini, para pekerja rentan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Program ini merupakan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan salah satu program unggulannya, yaitu memberikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, para pekerja rentan bisa bekerja dengan lebih tenang

dan bebas cemas, karena mereka tahu ada jaminan yang melindungi jika terjadi risiko.

4. Kemandirian Masyarakat Transmigrasi Belum Optimal

Paradigma baru transmigrasi tidak sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih kekurangan penduduk, lebih dari itu transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Penerbit Yogyakarta: Suparno, 2006). Perubahan paradigma transmigrasi merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup transmigran dan masyarakat sekitar sebagai upaya pengembangan kawasan transmigrasi dalam mencapai kemandirian masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan program transmigrasi dilakukan secara bertahap dan terencana, dimana tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan agar program ini terlaksana dengan baik dan efektif serta memperoleh hasil dan manfaat yang dapat dirasakan oleh transmigran dan masyarakat lokal. Dalam hal peningkatan kualitas dan kemampuan usaha bagi para transmigran, terlebih dahulu pemerintah melakukan pembekalan tentang pengetahuan, keterampilan, inovasi dan etos kerja yang baik kepada calon transmigran dalam rangka persiapan untuk mengelola dan mengembangkan semua potensi dan sumber daya yang terdapat didaerah tujuan transmigrasi.

Transmigran yang ditempatkan di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat merupakan transmigran yang berasal dari pulau Jawa. Para transmigran tersebut memiliki semangat dan etos kerja dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai pendatang, meskipun difase awal penempatan para transmigran harus memulai dari bawah untuk bekerja dan berusaha mengelola dan memanfaatkan potensi yang tersedia didaerah transmigrasi, namun dengan berjalan waktu ada transmigran yang tidak mampu mengelola lahan pertanian yang telah diberikan kepada transmigran menjadi lahan yang produktif, sehingga diperlukan pelatihan bagi transmigran didaerah penempatan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan transmigran melaksanakan sesuai dengan kondisi riil di pemukiman transmigrasi yang baru dengan keadaan geografis dan kultur tanah yang berbeda dengan daerah asal transmigran di Pulau Jawa.

Hasil evaluasi perkembangan satuan permukiman yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi pada tahun 2022 di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis mencantumkan bahwa luas permukiman transmigrasi seluas 0,25 Ha/KK terdapat okupasi lahan dimana lahan diklaim oleh warga sekitar, drainase di jalan poros sepanjang 2,5 Km rusak berat dan balai desa membutuhkan perbaikan. Indikator yang perlu ditingkatkan adalah pelibatan masyarakat serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Pulau Rupat namun mengalami kendala karena adanya banjir rob sehingga perlu adanya pelatihan dalam pengembangan kelapa sawit.

Belum optimalnya kemandirian masyarakat transmigran di Desa Makeruh dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan transmigran, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pelatihan saat berada di lokasi pemukiman transmigrasi dan bantuan teknis yang menjadi faktor penentu keberhasilan transmigran. Karenanya diperlukan strategi pemberdayaan berbasis pelatihan dan dukungan komunitas lokal serta memberikan rekomendasi kebijakan praktis dalam merancang program pelatihan dan kolaborasi komunitas yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat integrasi sosial dan ekonomi, serta mendukung pelaksanaan program transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Transmigran dapat mengolah tanah transmigrasi menjadi lahan produktif dengan mempertimbangkan kelayakan, ekonomi, politik dan admintrasi. Alternatif pertama adalah melakukan peningkatan ketrampilan pengetahuan bagi transmigran dengan melaksanakan kerjasama dengan balai latihan transmigran agar dapat memberdayakan sumber daya alam yang ada dilokasi penempatan transmigran, sehingga masyarakat transmigran dapat mengolah lahan transmigrasi menjadi lahan yang produktif dan meningkatkan perekonomian transmigran. Maka pengembangan masyarakat transmigran sejak awal penempatan di pemukiman transmigrasi sangatlah penting. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur didaerah transmigrasi, seperti jalan, irigasi dan fasilitas kesehatan untuk memudahkan akses transmigran dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi transmigran. Pada umumnya satuan permukiman transmigrasi memiliki potensi dan karakteristik ekonomi, sosial budaya yang beragam sehingga dituntut jenis dan perlakuan pembinaan yang berbeda.

Alternatif kedua, melakukan investasi ekonomi kerjasama dengan *stakeholder*. Kolaborasi yang terbangun dengan baik merupakan langkah strategis membangun pusat pertumbuhan berbasis agribisnis dikawasan transmigrasi. Potensi lokal didaerah transmigrasi seperti hasil pertanian, kerajinan tangan atau pariwisata harus dikembangkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi transmigran. Investasi dikawasan transmigrasi menawarkan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan mendukung ketahanan pangan serta sumber daya alam. Dengan konsep lahan komunal dan dukungan kebijakan yang tepat, kawasan transmigrasi dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Alternatif ketiga, pemberian lahan transmigrasi yang sudah ber sertifikat hak milik (SHM) untuk transmigran. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik perebutan tanah dilokasi transmigrasi, termasuk terjadinya okupasi oleh masyarakat setempat. Namun tantangan yang dihadapi sering kali terjadi sengketa lahan dengan masyarakat adat terhadap hak tanah ulayat sehingga diperlukan sinergitas antara Kementerian Transmigrasi dengan ATR/BPN dalam penyelesaian tanah transmigrasi, sehingga tidak merugikan transmigran dilokasi transmigrasi. Pemberian sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran banyak kendala yang dihadapi dalam permasalahan lahan yang akan diberikan kepada transmigran, sehingga pemerintah harus berupaya mempercepat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) melalui berbagai strategi, termasuk MoU dengan Kementerian dan Lembaga serta terkait pencarian data akurat di lokasi transmigrasi dan pengalokasian anggaran. Pemberian sertifikat hak milik (SHM) ini gratis, namun membutuhkan biaya untuk pengukuran, pemetaan dan proses administrasi.

Alternatif ke empat, meningkatkan pembinaan dan mengawasi program transmigrasi di daerah, termasuk pembinaan terhadap masyarakat transmigran serta memantau dan mengevaluasi kinerja program transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan publik terkait transmigrasi, seperti penerbitan kartu transmigrasi, konsultasi terkait transmigrasi dan penyediaan informasi terkait

kawasan transmigrasi. Dengan kondisi pada satuan permukiman transmigrasi, diperlukan perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di satuan permukiman transmigrasi. Oleh karena itu untuk lokasi pemukiman transmigrasi yang sudah ditempati perlu segera dilakukan perencanaan pengembangan masyarakat transmigran. Program transmigrasi dapat menjadi alternatif poros pembangunan pusat pertumbuhan baru (*epicentrum of growth*) dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan dapat menjadi fokus utama dalam mendorong pembangunan transmigrasi melalui kolaborasi berbentuk kemitraan dengan *stakeholder* lainnya diberbagai sektor strategis.

Kemandirian masyarakat transmigran dalam perekonomian dilakukan melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya lahan yang mereka miliki, pengembangan usaha ekonomi juga dilakukan dengan mengembangkan lembaga ekonomi lokal seperti kelompok tani dan koperasi, dengan harapan agar pertumbuhan usaha ekonomi warga transmigran dapat berjalan terarah dan terorganisasi dengan baik. Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan pada saat ini serta kondisi ideal yang seharusnya ada. Ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dengan jumlah dan kualitas yang memadai sangat menunjang berlangsungnya berbagai aktifitas kehidupan warga transmigran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan membandingkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 berdasarkan analisis kebutuhan pagu terkini dengan proyeksi pagu program penggalan tahun 2027 pada pagu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan proyeksi pagu program, kegiatan, sub kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 termasuk adanya rumusan program sebagai akibat adanya kebijakan nasional yang bersifat penting dan mendesak.

Tabel 2.7. Review Terhadap RKPD 2027 (T-C.31)

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
Urusan Ketenagakerjaan				**19.556.415.281**	**Urusan Ketenagakerjaan**				**19.556.417.242**	
2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	100%	13.035.301.454	2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	100%	13.035.303.659	
2.07.01.2.01 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	72.648.435	2.07.01.2.01 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	72.751.193	
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	72.648.435	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	72.751.193	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	2.07.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	
2.07.01.2.02 Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	10.072.551.702	2.07.01.2.02 Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	10.072.553.136	
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	10.072.551.702	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	10.072.553.136	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	0	-	2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	0	-	
2.07.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	100%	-	2.07.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	0%	-	
2.07.01.2.03.0002 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	2.07.01.2.03.0002 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
2.07.01.2.05 Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	-	2.07.01.2.05 Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	0	-	2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	
2.07.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	852.152.132	2.07.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	852.076.171	
2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.374.158	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.374.158	
2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.880.345	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.879.363	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.06.0004 Penyedian Bahan Logistik Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.940.000	2.07.01.2.06.0004 Penyedian Bahan Logistik Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.895.000	
2.07.01.2.06.0005 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	65.328.846	2.07.01.2.06.0005 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	65.328.650	
2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.950.000	
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	650.628.783	2.07.01.2.06.0006 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	650.649.000	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.06.0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	2.07.01.2.06.0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	-	
2.07.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	2.07.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	
2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kab. Bengkalis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	
2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis, Provinsi Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis, Provinsi Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	100%	1.735.757.185	2.07.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	100%	1.736.247.920	
2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	640.546.625	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	641.038.260	
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.999.100	
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	910.210.560	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	910.210.560	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	302.192.000	2.07.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	301.675.239	
2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	195.892.000	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	195.891.050	
2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	41.300.000	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	40.800.000	
2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	30.000.000	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	29.984.189	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	
2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100%	-	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	0%	-	
2.07.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Bengkalis	Persentase Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	100%	-	2.07.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Bengkalis	Persentase Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	0%	-	
2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	-	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bengkalis	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	0	-	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bengkalis	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	0	-	
2.07.03. Progam Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	100%	1.389.715.000	2.07.03. Progam Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	100%	1.389.713.366	
2.07.03.2.01. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Bengkalis	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya	100%	1.325.000.000	2.07.03.2.01. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Bengkalis	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya	100%	1.324.998.656	
2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Kab. Bengkalis	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	0	-	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Kab. Bengkalis	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	-	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	-	
2.07.03.2.01.0009 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bengkalis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	180 Orang	1.325.000.000	2.07.03.2.01.0009 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bengkalis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	100 Orang	1.324.998.656	Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Penguatan Kerjasama Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja"
2.07.03.2.02. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bengkalis	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	100%	64.715.000	2.07.03.2.02. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bengkalis	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	100%	64.714.710	
2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bengkalis	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	64.715.000	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bengkalis	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	64.714.710	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.03.2.03. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Terdaftar	100%	-	2.07.03.2.03. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Terdaftar	0%	-	
2.07.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0	-	2.07.03.2.03.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0	-	
2.07.03.2.04. Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Bengkalis	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya	100%	-	2.07.03.2.04. Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Bengkalis	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya	0%	-	
2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0	-	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	88%	142.559.602	2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	88%	142.562.395	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Meningkatkan Koordinasi Dengan Perusahaan Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal".
2.07.04.2.03. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	142.559.602	2.07.04.2.03. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bengkalis	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	142.562.395	
2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bengkalis	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	30.000.000	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bengkalis	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	30.003.343	
2.07.04.2.03.0003 Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Bengkalis	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	60 Orang	112.559.602	2.07.04.2.03.0003 Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Bengkalis	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	60 Orang	112.559.052	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.05. Program Hubungan Industrial *** *Program Unggulan*	Kab. Bengkalis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	85%	4.988.839.225	2.07.05. Program Hubungan Industrial *** *Program Unggulan*	Kab. Bengkalis	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	85%	4.988.837.822	
2.07.05.2.01. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	22%	67.240.492	2.07.05.2.01. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	22%	67.239.855	
2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	17.240.492	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	17.239.936	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	-	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kab. Bengkalis	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	-	
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	50.000.000	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	49.999.919	
2.07.05.2.02. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.921.598.733	2.07.05.2.02. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.921.597.967	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0	-	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0	-	
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	26 Perkara	25.000.000	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	26 Perkara	24.999.252	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.07.05.2.02.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	-	2.07.05.2.02.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	-	
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	38.200.000	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	38.200.000	
2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkalis	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24000 Orang	4.858.398.733	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkalis	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24000	4.858.398.715	Sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan "Program Unggulan Daerah Ke-3 : Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat" dengan langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain updating data peserta BPJS ketenagakerjaan, penyiapan Perda pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, peningkatan peran Badan Usaha untuk menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Urusan Ketransmigrasian				**142.286.173**	**Urusan Ketransmigrasian**				**142.284.212**	
3.32.02. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	0%	-	3.32.02. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100%	-	
3.32.02.2.01. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0%	-	3.32.02.2.01. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab.Bengkalis	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	100%	-	
3.32.02.2.01.0002 Sub Kegiatan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Bengkalis	Jumlah Kasus Yang Dapat Diselesaikan Untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0	-	3.32.02.2.01.0002 Sub Kegiatan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab. Bengkalis	Jumlah Kasus Yang Dapat Diselesaikan Untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0%	-	
3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0	-	3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.32.03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	64.999.208	3.32.03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	64.998.155	
3.32.03.2.01. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	100%	64.999.208	3.32.03.2.01. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	100%	64.998.155	
3.32.03.2.01.0006. Pelatihan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang	64.999.208	3.32.03.2.01.0006. Pelatihan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	16 Orang	64.998.155	
3.32.03.2.01.0020. Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	-	3.32.03.2.01.0020. Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Kab.Bengkalis	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	-	

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
3.32.04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100%	77.286.965	3.32.04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100%	77.286.057	
3.32.04.2.01. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Bengkalis	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	100%	77.286.965	3.32.04.2.01. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Bengkalis	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	100%	77.286.057	
3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bengkalis	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Pemukiman	77.286.965	3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bengkalis	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Pemukiman	77.286.057	
Total Anggaran				**19.698.701.454**					**19.698.701.454**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memperhatikan besaran angka partisipasi angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja serta kendala keterbatasan ketrampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja masyarakat Kabupaten Bengkalis yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap angka pengangguran yang ada, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten maka diusulkan beberapa jenis pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan baik *soft skill* maupun *hard skill* untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan jenis pelatihan yang rencananya akan dilaksanakan antara lain juru masak, *rigger*, *welder* dan operator kecelakaan dan keselamatan kerja.

Tabel 2.8. Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Berdasarkan Skala Prioritas (T-C.32)

No.	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja	Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	9 Kegiatan	Bertambahnya jumlah angkatan kerja yang belum memiliki ketrampilan (hardskill maupun soft skill) maka diperlukan pelatihan welder, rigger, K3, komputer, tata boga dan menjahit agar dapat meningkatkan pendapatan
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

==========

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Arah Kebijakan Presiden, prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

   Pemerintah pusat menempatkan sumber daya manusia sebagai kunci utama pembangunan. Arah kebijakannya adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis industri, sertifikasi kompetensi, dan perluasan kesempatan kerja. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan Program Ketenagakerjaan, khususnya kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi, dan Penempatan Tenaga Kerja untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatkan produktivitas di Kabupaten Bengkalis;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

   Salah satu strategi nasional adalah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui fasilitasi investasi padat karya, formalisasi UMKM, dan penempatan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berperan langsung dalam membuka akses ekonomi bagi masyarakat pencari kerja;
3. Peningkatan Iklim Investasi dan Kepastian Usaha

   Pemerintah mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan sebagai prasyarat iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

4. Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kawasan Transmigrasi

   Kebijakan nasional menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi sumber daya alam lokal. Kebijakan tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, yaitu melalui pembinaan kemandirian masyarakat transmigrasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan kelembagaan di Wilayah Pemukiman Transmigrasi (WP) di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, sekaligus menjawab permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi di daerah, guna mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis: "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia".

Selain mengacu pada kebijakan nasional, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 juga menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Riau yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

   Provinsi Riau memfokuskan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan pemagangan untuk menjawab kebutuhan industri unggulan daerah seperti sawit, migas, dan perikanan. Prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar penguatan Program Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis agar lulusan siap kerja dan terserap di sektor industri strategis Provinsi Riau;
2. Pengurangan Pengangguran dan Perluasan Kesempatan Kerja

   Pemerintah Provinsi Riau menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui perluasan akses informasi pasar kerja, bursa kerja, dan penempatan tenaga kerja ke dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lokal [AKL], Antar Kerja Antar Daerah [AKAD], dan Penyelenggaraan *Job Fair* untuk memperluas akses kerja bagi

masyarakat Bengkalis.

3. Perwujudan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Produktif

   Provinsi Riau mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan secara bipartit untuk menjaga stabilitas iklim investasi. Kebijakan ini menjadi landasan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan mediasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;

4. Pengembangan Wilayah dan Kemandirian Kawasan Transmigrasi

   Provinsi Riau menjadikan kawasan transmigrasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian transmigran. Kebijakan strategis ini menjadi arah kebijakan dalam Program Transmigrasi, yaitu pembinaan usaha ekonomi produktif, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi akses pasar yang ada di wilayah transmigrasi.

Dengan demikian, Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis disusun secara sinergis dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Visi Kabupaten Bengkalis: "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia".

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni ***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia".***

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029 maka misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah:

Misi 1: *Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.*

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: *Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.*

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya Melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3: *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.*

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang mengemban tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki tugas dan tanggung jawab yang merunut pada Misi ke-1 (satu) yakni “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian Yang Berdaya Saing” yang akan ditempuh melalui sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” dengan indikator sasaran strategis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagaimana diamanatkan didalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Penjabaran Misi ke-1 merupakan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi sesuai tugas dan fungsi bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan mendukung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 adalah "Peningkatan Daya Saing Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Wilayah Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat", dengan 4 (empat) prioritas:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, vokasi dan kesehatan);
2. Reformasi birokrasi (tata kelola dan kinerja aparatur);
3. Penguatan konektivitas dan peningkatan layanan infrastruktur;
4. Pengembangan kawasan pesisir dan daerah terpencil/tertinggal (lingkungan, ekonomi dan pemberdayaan)

dengan target makro pembangunan daerah antara lain (1) laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,70% sampai dengan 2,93%; (2) pendapatan per kapita sebesar 315,41 juta sampai dengan 325,78 juta; (3) tingkat kemiskinan 5,76% sampai dengan 4,90%; (4) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,80% sampai dengan 5,34%; (5) rasio gini sebesar 0,226 sampai dengan 0,231; (6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,49 sampai dengan 77,84; (7) penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 20,37% dan (8) Indkes Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 78,6%. Dari tema pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2027 beserta prioritas-prioritas pembangunannya maka dijabarkan kedalam isu strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2027 antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia secara merata dan inklusif;
2. Penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, transparan dan berbasis digital;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta konektivitas antar wilayah;
5. Penguatan kearifan lokal budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah;

6. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1		*2*	*3*
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase dari penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			

3.3. Program dan Kegiatan

Hasil telaahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis saat ini maupun yang akan datang menjadi dasar dalam perumusan beberapa program yang akan dilaksanaan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027.

Tabel 3.3. Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027

No.	Prioritas Daerah	Rumusan Masalah	Program
1	*2*	*3*	*4*
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, vokasi dan kesehatan) Target makro: Tingkat Pengangguran Terbuka (4,80% - 5,34%)	Angka Pengangguran	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial 5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 7. Program Pegembangan Kawasan Transmigrasi

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah proses penyusunan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai rujukan penggunaan akun belanja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengakalis Tahun 2027 mengusulkan total pagu yang direncanakan sebesar Rp. 19.698.701.454,- sebagai dukungan pendanaan untuk pelaksanaan 6 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, total pagu Rp. 13.035.303.659,- digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan rutin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis termasuk pembayaran gaji sebanyak 14 bulan dan tunjangan sebanyak 13 bulan bagi 42 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan gaji sebanyak 12 bulan ditambah 1 bulan gaji ke-13 bagi 19 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Waktu Tertentu;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp1.389.713.366,- dengan kegiatan pokok Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp. 142.562.395,- dengan kegiatan pokok Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online* serta *job fair*/bursa kerja;

4. Program Hubungan Industrial, total pagu anggaran Rp. 4.988.837.822,- dengan kegiatan pokok Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota serta mengakomodir pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja bagi 24.000 orang pekerja rentan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menangani kemiskinan yang difokuskan pada kegiatan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan;
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 64.998.155,- dengan kegiatan pokok pelatihan bagi masyarakat transmigrasi;
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang fokus pada sub kegiatan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman yang didukung oleh pendanaan sebesar Rp. 77.286.057,-.

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (T-C.33)

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Bengkalis	%	67,76	19.698.701.454			67,95	26.560.397.371
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Bengkalis	%	67,76	19.698.701.454			67,95	26.560.397.371
I	**Urusan Ketenagakerjaan**							**19.556.417.242**				**26.430.229.787**
	2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	13.035.303.659	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	17.952.688.648
	2 07 01 2 01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Bengkalis	%	100	72.751.193	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	227.564.700,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Dokumen	2	72.751.193,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	227.564.700,00
	2	07	01	2	02		Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	%	100	10.072.553.136	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	11.684.569.376
						0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Orang/ Bulan	64	10.072.553.136	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Gaji 14 bln, TPP 13 bln	81	11.684.569.376
	2	07	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	852.076.171	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	2.426.035.408
						0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	15.374.158	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	41.597.380

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	90.879.363	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	201.360.610
	0004	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	24.895.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	332.772.000
	0005	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	65.328.650	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	135.210.900
	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Dokumen	1	4.950.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	18.727.060
	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	Laporan	300	650.649.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		600	1.696.367.458

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2	07	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkalis	%	100	1.736.247.920	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	644.651.314
						0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Laporan	12	641.038.260	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		12	261.690.000
						0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kab. Bengkalis	Laporan	12	184.999.100	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		12	350.807.170
						0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	910.210.560	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	32.154.144
	2	07	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	301.675.239	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	2.969.867.850

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkalis	Unit	11	195.891.050	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		15	249.553.500
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkalis	Unit	24	40.800.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		20	72.450.000
	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	6	29.984.189	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		6	655.564.350
	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	1	35.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		4	1.992.300.000

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2	07	03				Progam Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	Kab. Bengkalis	%	100	1.389.713.366	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	853.613.565
	2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Bengkalis	%	100	1.324.998.656	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	703.613.565
						0009	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkalis	Orang	100	1.324.998.656	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Penguatan Kerjasama Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja"	100	703.613.564,52
	2	07	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	Kab. Bengkalis	%	100	64.714.710	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	150.000.000

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	10	64.714.710	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		10	150.000.000
	2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Kab. Bengkalis	%	88	142.562.395	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Meningkatkan Koordinasi Dengan Perusahaan Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal".	88	849.146.695,95
	2	07	04	2	03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bengkalis	%	100	142.562.395	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	849.146.695,95
						0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bengkalis	Orang	2000	30.003.343	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2500	253.481.233
						0003	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Kab. Bengkalis	Orang	60	112.559.052	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		250	595.665.462,95

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2	07	05				Program Hubungan Industrial *** *Program Unggulan*	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	Kab. Bengkalis	%	85	4.988.837.822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		90	6.774.780.879
	2	07	05	2	01		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	%	22	67.239.855	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		24	532.959.286
						0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bengkalis	Perusahaan	20	17.239.936	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		24	168.559.286,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkalis	Perusahaan	0	-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		15	164.800.000,00
						0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	49.999.919	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	199.600.000,00
	2	07	05	2	02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	%	100	4.921.597.967	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	6.241.821.593

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bengkalis	Perkara	26	24.999.252	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		28	125.949.580,000
						0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	1	38.200.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	125.949.580,000

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkalis	Orang	24000	4.858.398.715	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan "Program Unggulan Daerah Ke-3 : Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat" dengan langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain updating data peserta BPJS ketenagakerjaan, penyiapan Perda pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, peningkatan peran Badan Usaha untuk menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan	34.000	5.989.922.433
2.	**Urusan Ketransmigrasian**												**142.284.212**				**130.167.584**
	3	32	03				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	%	100	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	43.939.477
	3	32	03	2	01		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bengkalis	%	100	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	43.939.477

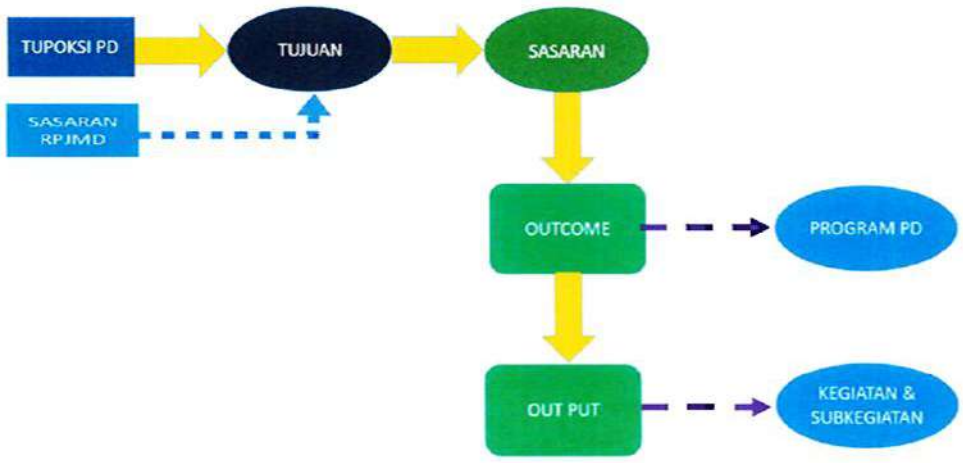
No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
						0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Bengkalis	Orang	16	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		20	43.939.477,00
	3	32	04				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	%	100	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	86.228.107,50
	3	32	04	2	01		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Bengkalis	%	100	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	86.228.107,50
	3	32	04	2	01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Bengkalis	Satuan Pemukiman	1	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	86.228.107,50
												TOTAL	**19.698.701.454**				**26.560.397.371**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

==========

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan penyelenggara urusan wajib bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian. Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara rinci di bab-bab sebelumnya, telaah dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, isu-isu strategis, visi-misi-tujuan serta sasaran pembangunan 5 tahun mendatang, arah kebijakan dan strategi, program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah menetapkan beberapa program dan kegiatan prioritas maupun program unggulan serta program dan kegiatan penunjang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan.



Gambar IV.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan
Sumber: Inmen No. 2 Tahun 2025

Dari Gambar IV.1. dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (eselon II), sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggung jawab Kepala Bidang/Kepala Bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian *output* kegiatan

menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (*input* dan proses).

Untuk meningkatkan kesempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 2 urusan yakni urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang dijabarkan ke dalam 3 program dengan Program Hubungan Industrial sebagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan fasilitasi penyaluran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi masyarakat rentan, dan urusan pilihan bidang transmigrasi yang dijabarkan ke dalam 2 program ditambah dengan 1 program penunjang urusan yang numenklaturnya telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan didalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yakni:

I. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

I.1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan keluaran (*outcome*) program meningkatnya kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja dan indikator *outcome* persentase calon tenaga kerja yang terlatih. Dalam program ini mengakomodir kegaiatan:

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatannya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dan sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota;
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sub kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi;

d. Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil;

I.2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Keluaran (*outcome*) Program Penempatan Tenaga Kerja adalah meningkatnya penempatan tenaga kerja dengan indikator *outcome* persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan (a) Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja *Online* dan (b) *Job Fair*/Bursa Kerja;

I.3. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dengan keluaran (*outcome*) program meningkatnya tenaga kerja yang terlindungi dengan indikator *outcome* besaran kasus yang diselesaikan. Dalam program ini diakomodir kegiatan:

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya (a) Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan, (b) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan, (c) Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan;

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatannya antara lain (a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di Daerah/Kabupaten/Kota, (c) Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi, (d) Pelakasanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripart Daerah/Kabupaten/Kota, dan (e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Program Hubungan Industrial merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka perwujudan "akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat" berupa bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi masyarakat rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, dan pekerja bongkar muat. Program ini dijalankan melalui skema pembayaran iuran oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang berarti iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan tanpa perlu membayar iuran. Inisiatif ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD guna melindungi pekerja rentan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

II. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

II.1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan keluaran (*outcome*) program meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator *outcome* persentase pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan (a) Pelatihan Transmigrasi dan (b) Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi;

II.2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Kawasan Transmgrasi dengan keluaran (*outcome*) program meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi dengan indikator *outcome* persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan, mengakomodir kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian dengan sub kegiatannya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.

Program dan kegiatan penunjang merupakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program prioritas atau juga program dan kegiatan yang rutin dilakukan untuk memberikan dukungan menajemen bagi penyelenggaraan tugas prioritas dan tugas teknis lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan keluaran (*outcome*) program meningkatnya dukungan

pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah dengan indikator *outcome* program persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah. Program penunjang tersebut mengakomodir beberapa kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan (a) Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, (b) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, (c) Penyedian Bahan Logistik Kantor, (d) Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan, (e) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, (g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, (h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan (a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, (c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, (b) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, (d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Tabel IV.1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2027

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Bengkalis	%	67,76	19.698.701.454	
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Bengkalis	%	68,76	19.698.701.454	
I	**Urusan Ketenagakerjaan**							**19.556.417.242**	
	2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	13.035.303.659	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2 07 01 2 01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Bengkalis	%	100	72.751.193,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Dokumen	2	72.751.193,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	01	2	02		Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	%	100	10.072.553.136	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Orang/ Bulan	64	10.072.553.136	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	852.076.171	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	15.374.158	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	90.879.363	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0004	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	24.895.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0005	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	2	65.328.650	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Dokumen	1	4.950.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	Laporan	300	650.649.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkalis	%	100	1.736.247.920	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Laporan	12	641.038.260	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Laporan	12	184.999.100	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	910.210.560	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	301.675.239	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkalis	Unit	11	195.891.050	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkalis	Unit	24	40.800.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	6	29.984.189	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	1	35.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	03				Progam Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	Kab. Bengkalis	%	100	1.389.713.366	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Bengkalis	%	100	1.324.998.656	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0009	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkalis	Orang	100	1.324.998.656	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	Kab. Bengkalis	%	100	64.714.710	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	10	64.714.710	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Kab. Bengkalis	%	88	142.562.395	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2	07	04	2	03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bengkalis	%	100	142.562.395	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bengkalis	Orang	2000	30.003.343	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0003	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Kab. Bengkalis	Orang	60	112.559.052	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	2	07	05				Program Hubungan Industrial *** *Program Unggulan*	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	Kab. Bengkalis	%	85	4.988.837.822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2	07	05	2	01		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	%	22	67.239.855	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bengkalis	Perusahaan	20	17.239.936	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkalis	Perusahaan	0	-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggarayan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	49.999.919	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2	07	05	2	02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupatan /Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bengkalis	%	100	4.921.597.967	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesaikanny a Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bengkalis	Perkara	26	24.999.252	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	1	38.200.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkalis	Orang	24000	4.858.398.715	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2.	**Urusan Ketransmigrasian**												**142.284.212**	
	3	32	03				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	%	100	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	3	32	03	2	01		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab.Bengkalis	%	100	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab.Bengkalis	Orang	16	64.998.155	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	3	32	04				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkalis	%	100	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	3	32	04	2	01		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab. Bengkalis	%	100	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Tujuan / Sasaran Strategis/Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /	Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	3	32	04	2	01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Bengkalis	Satuan Pemukiman	1	77.286.057	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
												TOTAL	**19.698.701.454**	

BAB V

PENUTUP

==========

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2027 disusun berdasarkan petunjuk teknis dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 19.698.701.454,- bagi pelaksanaan 6 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan termasuk didalamnya 1 program unggulan dan 1 program strategis Pemerintah Daerah. Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis ini diharapakan pelaksanaan program kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada di Kabupten Bengkalis. Terkait hal-hal penting maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan tetap mempedomani peraturan perundangan-undangan.

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2027 ini disusun. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan diharapkan dari semua unsur yang terlibat dapat memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen ini.

Bathin Solapan, 3 Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

Sevnur, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720511 199803 1 008

LAMPIRAN

Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Nomor 700.1.2.1/109/ITDA tanggal 30 Juli 2026, dilakukan perbaikan indikator tujuan dan indikator sasaran yang tertera didalam tabel 3.1 yang berpengaruh terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang tertera didalam tabel 3.2.

Tabel 3.1. Perbaikan Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

SEBELUM			SESUDAH		
Tujuan/ Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Tujuan/ Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,76%	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%

Tabel 3.2. Perbaikan Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2027

SEBELUM						SESUDAH				
No.	**Tujuan/ Sasaran**	**Indikator**	**Indikator Kinerja Utama**	**Definisi Operasional**	**Formulasi Perhitungan**	**Tujuan/ Sasaran**	**Indikator**	**Indikator Kinerja Utama**	**Definisi Operasional**	**Formulasi Perhitungan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase dari penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka			

Bathin Solapan, 31 Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

Sevnur, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720511 199803 1 008

PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025 TERHADAP
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2															2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	07														2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2	07	01			
	2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	07	01	2.01		
	2	07	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	07	01	2.01	0001	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	01	2.01	0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	07	01	2.01	0006	
	2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2	07	01	2.02		
	2	07	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2	07	01	2.02	0001	
	2	07	01	2.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			2	07	01	2.02	0003	
	2	07	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		2	07	01	2.03		
	2	07	01	2.03	0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2	07	01	2.03	0002	
	2	07	01	2.05			Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	07	01	2.05		

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	01	2.05	0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2	07	01	2.05	0009	
	2	07	01	2.06			Adminitrasi Umum Perangkat Daerah							Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		2	07	01	2.06		
	2	07	01	2.06	0001			Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2	07	01	2.06	0001	
	2	07	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2	07	01	2.06	0002	
	2	07	01	2.06	0004			Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyedian Bahan Logistik Kantor			2	07	01	2.06	0004	
	2	07	01	2.06	0005			Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan			2	07	01	2.06	0005	
	2	07	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			2	07	01	2.06	0006	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	01	2.06	'0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	07	01	2.06	'0009	
	2	07	01	2.06	0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2	07	01	2.06	0011	
	2	07	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	07	01	2.07		
	2	07	01	2.07	0005			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel			2	07	01	2.07	0005	
	2	07	01	2.07	0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	07	01	2.07	0010	
	2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	07	01	2.08		
	2	07	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	07	01	2.08	0001	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2	07	01	2.08	0002	
	2	07	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2	07	01	2.08	0004	
	2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	07	01	2.09		
	2	07	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	07	01	2.09	0002	
	2	07	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2	07	01	2.09	0006	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	01	2.09	0009			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2	07	01	2.09	0009	
	2	07	01	2.09	0010			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	07	01	2.09	0010	
	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2	07	02			
	2	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	07	02	2.01		
	2	07	02	2.01	0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			2	07	02	2.01	0001	
	2	07	02	2.01	0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	Orang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			2	07	02	2.01	0003	
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2	07	03			
	2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2	07	03	2.01		

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	03	2.01	0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	Orang											
	2	07	03	2.01	0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	Lembaga	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.			2	07	03	2.01	0002	
	2	07	03	2.01	0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota			2	07	03	2.01	0003	
											Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			2	07	03	2.01	0009	
	2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		2	07	03	2.02		

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	03	2.02	0001			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Lembaga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			2	07	03	2.02	0001	
	2	07	03	2.03			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja							Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		2	07	03	2.03		
	2	07	03	2.03	0001			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	Perizinan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			2	07	03	2.03	0001	
	2	07	03	2.04			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		2	07	03	2.04		
	2	07	03	2.04	0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			2	07	03	2.04	0001	
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2	07	04			
	2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		2	07	04	2.03		
	2	07	04	2.03	0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			2	07	04	2.03	0002	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	04	2.03	0003			Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Job Fair /Bursa Kerja			2	07	04	2.03	0003	
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	07	05			
	2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perushaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		2	07	05	2.01		
	2	07	05	2.01	0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan			2	07	05	2.01	0001	
	2	07	05	2.01	0002			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan			2	07	05	2.01	0002	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	05	2.01	0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			2	07	05	2.01	0003	
	2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		2	07	05	2.02		
	2	07	05	2.02	0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2	07	05	2.02	0001	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
	2	07	05	2.02	0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2	07	05	2.02	0002	
	2	07	05	2.02	0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	Asosiasi dan Serikat Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			2	07	05	2.02	0003	
	2	07	05	2.02	0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota			2	07	05	2.02	0004	
	2	07	05	2.02	0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	Orang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			2	07	05	2.02	0005	

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
Urusan Pemerintahan Pilihan	3															3					Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	32														3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI									PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3	32	02			
	3	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi							Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		3	32	02	2.01		
	3	32	02	2.01	0002			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan			3	32	02	2.01	0002	
	3	32	02	2.01	0004			Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi			3	32	02	2.01	0004	
	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3	32	03			
	3	32	03	2.01			Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		3	32	03	2.01		

Bidang Urusan Pemerintahan	Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025										Pemutakhiran KEPMENDAGRI NO. 900.1-861 TAHUN 2026										Bidang Urusan Pemerintahan
	Kode					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode						
	3	32	03	2.01	0006			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	Orang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Transmigrasi			3	32	03	2.01	0006	
	3	32	03	2.01	0020			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	Lokasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			3	32	03	2.01	0020	
	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3	32	04			
	3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		3	32	04	2.01		
	3	32	04	2.01	0002			Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan	Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			3	32	04	2.01	0002	

Bathin Solapan, 31 Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

Sevnur, S.ST.,M.T
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720511 199803 1 008